



## Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014

Emi Megawati<sup>1✉</sup>, Lesta Karolina Br Sebayang<sup>2</sup>

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima April 2018

Disetujui Juni 2018

Dipublikasikan Agustus 2018

*Keywords:*

HDI, GDRP, FEM,

Poverty, Financing

Education, Central Java

Province

### Abstrak

Berdasarkan data dari BPS, kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2014 masih berada di peringkat kedua setelah DI Yogyakarta di Pulau Jawa-Bali. Penelitian ini menggunakan data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dengan metode Generalized Least Square (GLS). Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel PDRB dan pembiayaan pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil uji secara bersama-sama menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap kemiskinan. nilai dari Adjusted R2 sebesar 0,995 yang berarti 99,5 persen kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sedangkan sisanya 0,50 persen dijelaskan oleh variabel di luar model.

### Abstract

Based on data from BPS, during years 2011-2014 Central Java Province are in number 2 after DI Yogyakarta in Java-Bali. This research use panel data with Fixed Effect Model (FEM) approach and by using Generalized Least Square (GLS) method. The data source is secondary data are obtained from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Financial Balance Indonesia. The result of this research show that HDI variable give the negative and significant influence to the poverty in Central Java province. GDRP and financing of education not significant influence to the poverty in Central Java province. Simultaneous test results showed that, overall, the independent variable (HDI, GDRP and financing of education) together can show its effect on poverty. the value of Adjusted R2 of 0,995, which means 99,5 percent of poverty can be explained by the independent variable. While the remaining 0,50 percent is explained by variables outside the model.

## PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan.

Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses

pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit suatu negara, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Marmujiono, 2014:160).

**Tabel 1.** Presentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa-Bali Tahun 2011-2014

Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)				
	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
DKI Jakarta	3,75	3,69	3,72	4,09	3,81
Jawa Barat	10,65	10,09	9,61	9,44	9,94
Jawa Tengah	15,76	15,34	14,44	14,46	15
DI Yogyakarta	16,08	16,05	15,03	15	15,54
Jawa Timur	14,23	13,4	12,73	12,28	13,16
Baten	6,32	5,85	5,35	5,51	5,75
Bali	4,2	4,18	3,95	4,53	4,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 dengan angka rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 15 persen masih terbilang tinggi karena tergolong *hard core* (>10 persen) yang mengindikasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah Provinsi masih belum berjalan dengan optimal.

Situasi perekonomian yang semakin membaik menyebabkan berkurangnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. BPS (2015), pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 5,26 juta jiwa atau sekitar 15,76 persen. Kemudian tahun 2012 menurun menjadi 4,95 juta jiwa atau sekitar 15,34 persen. Pada tahun 2014 turun lagi menjadi 4,81 juta jiwa atau sekitar 14,46 persen dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat suatu negara atau daerah dapat dilihat dari pemerataan PDB di tingkat nasional atau PDRB di tingkat daerah.

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 mencapai 5,42 persen, lebih cepat dibandingkan tahun 2013 dengan laju pertumbuhan 5,14 persen yang mengalami penurunan dari tahun 2012 dari 5,34 persen menjadi 5,14 persen. Penurunan tersebut disebabkan kondisi perekonomian global yang belum mengalami perbaikan yang signifikan. Dari sisi sektoral, perlambatan terjadi pada sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

**Tabel 2.** Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014

Tahun	PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	656.268.129,91	5,30
2012	691.343.115,96	5,34
2013	726.899.706,38	5,14
2014	766.271.771,27	5,42

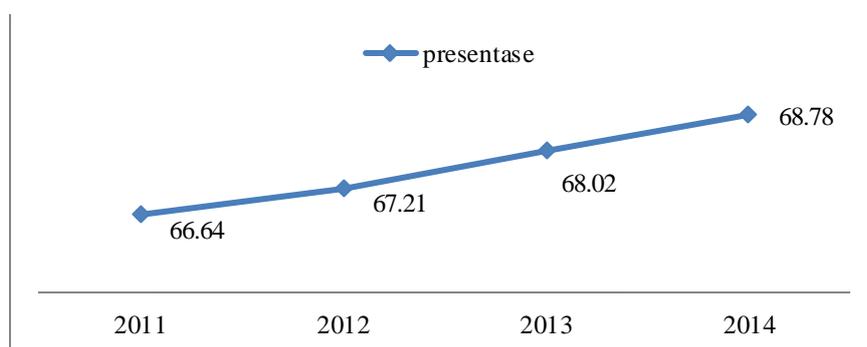
Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai terbitan

Selain dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Lanjouw dalam Saputra (2011:45) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah

tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2011-2014. IPM di Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 66,64 persen pada tahun 2011 menjadi 68,78 persen pada tahun 2014. Pada periode 2013-2014, IPM Provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar 0,76 poin. Peningkatan pada periode tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode 2012-2013, yang naik sebesar 0,81 poin. Meskipun selama periode 2011-2014 IPM Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah masih stagnan. Hingga saat ini, pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah masih berstatus “sedang”, dan masih sama sejak tahun 2010.



**Gambar 1.** Presentase Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014, data diolah

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah belanja pemerintah di bidang pendidikan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Biaya atau anggaran bidang pendidikan di provinsi Jawa Tengah paling tinggi ke-4 setelah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan

Provinsi Jawa Timur. Selain itu anggaran bidang pendidikan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2014 selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan dari tahun 2011-2014. Namun anggaran tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi meskipun anggaran bidang pendidikan selalu mengalami peningkatan.

**Tabel 3.** Anggaran Bidang Pendidikan Pulau Jawa-Bali Tahun 2011-2014  
(jutaan rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014
DIY	254,362	273,588	251,362	326,872
Bali	219,402	219,904	237,859	-
Banten	-	250,024	301,333	341,898
Jawa Barat	684,529	735,731	831,95	684,577
Jawa Tengah	307,026	301,254	318,511	324,253
Jawa Timur	384,641	448,573	514,846	531,299
DKI Jakarta	8115,163	10120,366	12815,351	-

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, data diolah

**METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari data jumlah penduduk miskin, IPM, PDRB dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan bantuan Eviews-9. Gujarati (2012:237), menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit cross section yang sama disurvei dalam beberapa waktu.

Penelitian ini mengenai pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pembiayaan pendidikan (PP) terhadap jumlah penduduk miskin (PM). Menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dengan metode Generalized Least Square (GLS).

Model fungsi yang digunakan untuk mengetahui kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu:

$$PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 PP_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- PM = Jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah
- IPM = Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Tengah
- PDRB = Jumlah PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah
- PP = Pembiayaan pendidikan kabupaten/kota di Jawa Tengah
- $\beta_0$  = Intersep
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi variabel bebas
- $\mu_{it}$  = Komponen error di waktu t untuk unit cross section i
- i = 1, 2, 3, ..., 35 (data cross section kabupaten/kota di Jawa Tengah)
- t = 1, 2, 3, 4 (data time series, tahun 2011-2014).



pengujian secara statistik. Pengujian secara statistik dalam hal ini berupa Uji koefisien determinasi, Uji F statistik, dan Uji t statistik.

#### Uji F Statistik

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh yaitu nilai  $F\text{-hitung} = 748,8704 > F\text{-tabel} = 2,67$ , maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga hasil uji F menyatakan bahwa variabel independen yaitu IPM, PDRB dan PP (pembiayaan pendidikan) secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen yaitu jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

#### Uji t-Statistik

Hasil Uji t-statistik pada Pengaruh IPM, PDRB dan PP Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa tidak semua variabel bebas berpengaruh signifikan dalam model, dimana ada variabel bebas yang memiliki nilai probabilitas dari t-statistik yang lebih besar dari taraf nyata yang digunakan ( $\alpha=0,5\%$ ). Adapun variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan yaitu hanya IPM. Sedangkan PDRB dan PP tidak berpengaruh secara signifikan.

**Tabel 4.** Hasil Uji t-statistik pada Pengaruh IPM, PDRB dan PP Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Variabel	t-statistik	Probabilitas	t-tabel	Kesimpulan
IPM	-11,8787	0,0000	1,978	Signifikan pada $\alpha = 5\%$
PDRB	-0,9954	0,3219	1,978	Tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$
PP	1,2451	0,2159	1,978	Tidak Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber: Data sekunder IPM, PDRB dan PP tahun 2011-2014, data diolah

#### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi ini menunjukkan tingkat atau derajat keakuratan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa Adjusted R-square atau nilai dari  $R^2$  adalah 0,9949, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variasi model dari IPM, PDRB dan PP sebesar 99,50% dan sisanya sebesar 0,50% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model atau variabel-variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini

#### Interpretasi Hasil dan Pembahasan IPM dan Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien pada variabel IPM yaitu sebesar -8.757,928. Jika IPM mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 8.757 jiwa. Menurut Lanjouw

dalam Saputra (2015:45) menyatakan pembangunan manusia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk yang tidak miskin. Menurunnya angka kemiskinan saat IPM meningkat merupakan indikasi bahwa tingginya kualitas sumber daya manusia yang akan berakibat pada meningkatnya produktifitas kerja penduduk yang akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat menurunkan angka kemiskinan.

IPM memuat tiga komponen penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga komponen penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan (Napitupulu dalam Cholil, 2014:7).

### **PDRB dan Kemiskinan**

Berdasarkan hasil estimasi variabel PDRB menunjukkan tanda negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien PDRB menunjukkan sebesar -0,390412. Jika PDRB mengalami kenaikan sebesar satu persen maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 3,90412 persen. Menurut Siregar dalam Wibisono (2015:25) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Selain itu, syarat kecukupan adalah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan itu hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2014), juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa penambahan pendapatan masyarakat juga meningkat. Apabila pendapatan masyarakat bertambah maka dapat diperkirakan masyarakat akan terbebas dari kemiskinan. Sehingga ketika pertumbuhan ekonomi naik maka kemiskinan akan turun.

### **Pembiayaan Pendidikan dan Kemiskinan**

Berdasarkan hasil regresi nilai koefisien pada variabel PP (pembiayaan pendidikan) menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 3,90E-09 (0,0000000390). Maka variabel pembiayaan pendidikan berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya apabila pembiayaan pendidikan naik sebesar satu persen maka jumlah penduduk miskin akan mengalami peningkatan sebesar 0,000390 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan meningkat tetapi tidak diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBD dan APBN. Tetapi pada kenyataannya dana tersebut habis untuk gaji

pendidik bahkan alokasi untuk pendidikan sendiri belum mencapai 20 persen.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkolis (2011:8) bahwa Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo yang merupakan sampel dari penelitian menyatakan anggaran pendidikan termasuk gaji pendidik masing-masing mencapai 40-46 persen dan 46-55 persen dari realisasi belanja APBD tahun 2008-2011. Namun jika tidak termasuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Wonosobo hanya berkisar 3-9 persen, sedangkan di Kabupaten Purworejo berkisar antara 5-9 persen.

Menurut Simmons yang dikutip dari Todaro dalam Wijayanto (2010:43), menyatakan bahwa pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan yang baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Besaran dari pengeluaran ditetapkan oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi angka kemiskinan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Variabel PDRB memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel pembiayaan pendidikan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara bersama-sama variabel IPM, PDRB dan pembiayaan pendidikan mampu memberikan penjelasan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dengan koefisien sebesar 99,5% dan sisanya sebesar 0,50% dijelaskan oleh variabel diluar model.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan lagi pelayanan di sektor pendidikan secara gratis bagi masyarakat miskin. Mempertajam program pembebasan biaya

pendidikan khususnya untuk penduduk miskin dan perluasan akses pendidikan bagi semua. Pemerintah diharapkan tidak hanya terfokus pada pertumbuhan PDRB saja, tetapi pemerataannya juga harus lebih diperhatikan..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Saputra, Whisnu. 2011. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah". Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Adi Wibowo, Dian. "Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah". Jurnal Economic. Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014.
- Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Marmujiono, Slamet Priyo. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Tahun 2009-2011". Economics Development Analysis Journal. 3 (1) (2014).
- Mufid Cholil, Fathul. 2014. " Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). Skripsi. Malang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Nurkolis. 2011. Belanja Pendidikan Tersedot Untuk Belanja Pegawai. IKIP PGRI. Semarang. Hal 1-16.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan.
- Dwi Wijayanto, Ravi. 2010. "Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008". Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Yudi Wibisono, Radityo. 2015. "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008-2013". Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.